

MENELITIDIAN TARA DESINGAN PELURU, ASAP, AIR MATA, DAN RERUNTUHAN

Penelitian Sosial di Daerah Konflik dan Pasca Bencana

Oleh: **George Junus Aditjondro**
(Konsultan Yayasan Tanah Merdeka, Palu)

Penelitian sosial di daerah konflik atau daerah yang baru dilanda bencana, tidak bisa dilakukan seperti penelitian sosial di daerah 'normal', terhadap komunitas 'normal', untuk menjawab penelitian yang 'normal'. Baik kendala waktu, maupun sipeneliti, sendiri ataupun bersama *team-nya*, kadang-kadang harus bergerak cepat, tanpa minta izin atau tanpa menempuh semua birokrasi penelitian yang diwajibkan oleh negara atau kekuatan-kekuatan politik yang berkuasa di daerah itu.

Kendati demikian, penelitian sosial di daerah konflik atau dalam situasi pasca bencana, tetap menghendaki penelitian ilmiah (*scientific rigour*) dijaga. Di daerah konflik, secara khusus, peneliti harus menjaga agar dia sendiri tidak digerogoti oleh prasangka-prasangka yang mungkin masih diidap oleh pihak yang diteliti. Makanya, dalam tulisan singkat ini, penulis pertama-tama akan menguraikan berbagai *bias* yang sering dihadapi, atau yang menghinggapi, peneliti di daerah konflik, seperti Poso, atau daerah yang baru saja menghadapi bencana alam yang luar biasa, seperti Aceh. Sesiidahnya, penulis akan mengajukan saran-saran untuk mengatasi berbagai jebakan itu.

A. BERBAGAI BIAS DALAM PENELITIAN DI DAERAH KONFLIK

1. Bias 'kami' versus 'mereka'

Semakin intens dan semakin lama suatu konflik berlangsung, bahaya keterlibatan emosional peneliti makin besar, yang ditandai *triumfalisme* terhadap komunitas sendiri dan *pelecehan* terhadap kelompok 'lawan'. Akibatnya, secara tidak sadar, peneliti dapat dihinggapi *bias* menganggap mereka yang dimusuhi oleh negara, atau mereka yang bertentangan dengan

komunitas/kelompok asal peneliti sendiri, sebagai pengacau. Kalau demikian keadaannya, 'gerombolan pengacau liar' itu dapat dianggap mengganggu ketenteraman komunitas yang dekat atau didampingi peneliti, dan bukan faktor penyebab dari luar. Ini sering terjadi, apabila ia bukan peneliti 'independen', melainkan peneliti yang bekerja untuk lembaga pendamping pengungsi IDP (*internally displaced persons*).

2. Amplifikasi bias 'kami' versus 'mereka'.

Ada enam faktor yang dapat memperkuat bias 'kami' versus 'mereka', yakni a) panjangnya rantai informasi, b) amplifikasi korban dari pihak 'mereka' dan reduksi korban dari pihak 'sendiri', c) politik kepentingan dari berbagai lembaga pemerintah, d) segregasi etno-religius, e) segregasi ideologis, dan f) persepsi tentang asimetri kekuasaan dan pengaruh kelompok atau komunitas yang bertikai.

- a) Panjangnya rantai informasi, makin panjang rantai informasi, makin besar bahaya distorsi, sebab makin banyak perantara informasi yang mendengardari informan sebelumnya ('katanya', 'katanya', 'katanya')
- b) Amplifikasi korban dari pihak 'mereka' dan reduksi korban dari pihak 'sendiri', semakin panjang rantai informasi, semakin besar kecenderungan untuk memperbesar atau memperkecil jumlah korban. Baik korban yang terbunuh oleh aparat keamanan negara dan pemberontak, maupun korban yang meninggal karena bencana alam.
- c) Politik kepentingan dari berbagai lembaga pemerintah, apabila kepentingan dari berbagai kalangan resmi, maka jumlah korban yang dinyatakan sebagai 'angka resmi' mewakili kepentingan lembaga pemerintah yang bersangkutan. Dalam konflik bersenjata, aparat keamanan negara berkepentingan memperkecil jumlah korban dari pihak mereka sendiri, dan memperbesar jumlah korban dari pihak lawan. Dalam hal bencana alam, Dinas Departemen Kesehatan berkepentingan memperbesar jumlah korban yang tidak meninggal, sebab ini dapat memperbesar anggaran yang mereka terima. Sedangkan Dinas/Departemen Kesejahteraan Sosial punya kepentingan memperbesar jumlah korban yang meninggal maupun tidak meninggal, sebab kedua kategori korban itu berpotensi memperbesar anggaran yang dapat mereka terima.
- d) Segregasi etno-religius, di daerah di manan konflik bersifat komunal atau sektarian, peneliti seringkali hanya dapat mewawancarai orang dari komunitas etnis atau religius yang sama. Bahkan di daerah yang

(sebagian?) penduduknya berseteru dengan pemerintah pusat, dimensi etno-religius dapat menghambat atau memperlancar wawancara. Misalnya, satu ketika almarhum Munir datang ke Aceh dan mewawancarai seorang aktivis Aceh Merdeka, dia diperkenalkan *guidenya* sebagai 'orang Arab', dan bukan 'orang Jawa'. Sebab label 'orang Arab' dapat diasosiasikan sebagai 'sesama Muslim', sedangkan label 'orang Jawa' dapat diasosiasikan dengan serdadu TNI atau Brimob yang dikirim ke Aceh untuk menumpas gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kebetulan, almarhum adalah orang Jawa keturunan Arab, bernama lengkap Munir Said Thalib.

- e) Segregasi ideologis, di daerah di mana konflik bersifat ideologis, misalnya pro atau kontra NKRI, atau misalnya dalam kasus Aceh, pro dan kontra GAM, peneliti yang sudah dianggap pro pihak lawan akan susah sekali mendapatkan akses ke kalangan 'pemberontak'. Sama halnya, peneliti yang mewawancarai aparat keamanan negara, dari pertanyaan yang diajukan sudah dapat dicurigai bersimpati dengan 'pemberontak'. Kembali lagi, faktor etno-religius sangat berperan. Misalnya, ketika meneliti dampak pendudukan Timor Leste oleh serdadu Indonesia, identitas ke-Katolik-an penulis lebih banyak membantu membuka hati penduduk asli Timor Leste untuk memberikan data yang sensitif kepada penulis. Sedangkan di antara tentara pendudukan, nama keluarga penulis lebih bermanfaat untuk mendapatkan informasi.
- f) Persepsi tentang asimetri kekuasaan dan pengaruh kelompok atau komunitas yang bertikai, dalam penelitian di Ambon dan Poso, berbagai juru bicara komunitas yang bertikai cenderung menghalalkan 'perjuangan' mereka dengan memberikan persepsi mereka masing-masing, tentang siapa yang lebih dulu menyerang dan siapa yang hanya membela diri. Lebih jauh lagi, persepsi tentang asimetri kekuasaan dan pengaruh itu diperluas ke dunia internasional, dengan menekankan bahwa kelompok 'lawan' lebih banyak mendapat bantuan dan dukungan dunia internasional. Komunitas Nasrani dipersepsikan dengan dengan *lobby* Yahudi internasional, PBB dan dunia Barat, sedangkan komunitas Muslim dipersepsikan dekat dengan al Qaeda dan dunia Arab. Padahal, kedua persepsi itu sama-sama keliru. Pada akhirnya, yang menentukan dukungan negara-negara Barat atau negara-negara Arab adalah peluang menguasai sumber daya alam di negara tempat asal komunitas-komunitas yang bertikai. Misalnya, AS dan PBB akhirnya mendukung hak bangsa Maubere (Timor Leste) untuk merdeka, dan mengusir tentara

pendudukan Indonesia dengan meminjam kekuatan tentara Australia, bukan karena AS begitu pro-HAM. Timor Leste dibebaskan dari pendudukan Indonesia, karena pemimpin-pemimpin perlawanan Timor Leste, terutama Ramos Horta, Xanana, dan kemudian Mar'ie Alkatiri, bersedia tunduk pada kepentingan maskapai-maskapai migas AS dan para kroninya di Australia.

3. Ketergantungan pada sumber-sumber resmi

Ketergantungan peneliti pada sumber-sumber resmi dapat menimbulkan dua bentuk distorsi. Pertama, distorsi informasi tentang jumlah korban, seperti disinggung di atas. Kedua, sumber resmi dari aparat keamanan sering mengaburkan kepentingan satuan-satuan bersenjata resmi serta paramiliter. Kepentingannya dapat berbentuk peluang bisnis dan korupsi secara langsung, maupun 'uangjasaproteksi' dari maskapai-maskapai besar, yang dibuka jalannya lewat kerusuhan dan konflik bersenjata.

4. Jebakan Rabun Jauh

Faktor-faktor yang menonjol ke permukaan, dalam kasus Poso hanyalah adu kekuatan massa yang saling berhadapan, di mana aparat keamanan seringkali dipersepsikan sebagai penengah (mediator) dan pelindung rakyat. Dalam kasus perang tentara TNI dan GAM yang sudah menelan 2,5 triliun sebelum *tsunami* melanda Aceh, yang tampak hanyalah 'perang tanding' antara gerilyawan dan tentara dengan korban dari kedua belah pihak. Setelah *tsunami*, konflik bersenjata tidak tampak lagi. Yang ditonjolkan oleh media elektronik domestik adalah operasi bhakti militer, menyelamatkan korban yang masih hidup dan menguburkan ribuan mayat di mana-mana.

Sementara itu, yang kurang tampak adalah bagaimana kekuatan-kekuatan besar, khususnya maskapai manca negara dan maskapai yang dekat dengan atau ikut dimiliki militer diuntungkan oleh bencana alam atau konflik berkepanjangan.

Sebab yang terjadi di daerah konflik seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, maupun di daerah yang menentang kedaulatan NKRI, seperti Aceh dan Papua Barat, adalah kolusi antara modal, *militer yang anti reformasi*, *paramiliter*, serta *birokrat* dan *pedagang* yang berkongsi dalam dalam '*industri pengungsi*'. Dalam kasus Sulawesi Tengah, konglomerat yang diuntungkan oleh kerusuhan di Kabupaten Poso dan Morowali, adalah kelompok Arta Graha di Morowali, kelompok Medco di

lepas pantai Teluk Tolo dan daratan Kabupaten Banggai, serta kelompok Bukaka yang kini sedang membangun PLTA Sulewana di Sungai Poso (Lihat Aditjondro, 2004b: 53-5; Aditjondro, 2004c; Aditjondro, 2004d; Gogali (tt); serta komunikasi dengan sejumlah nara sumber di Tentena, Juli, 2005).

Dalam kasus Maluku Utara, yang diuntungkan adalah maskapai tambang bermodal Australia, Newcrest, di mana tambang emasnya kini dilindungi oleh pasukan Brimob yang didatangkan untuk menengahi konflik antara suku Makian yang Muslim, serta penduduk asli Kecamatan Kao yang Nasrani dan Togutil yang beragama suku (lihat Aditjondro, 2004b: 54). Dalam kasus Maluku sendiri, yang diuntungkan adalah maskapai tambang emas bermodal Kanada, Ingold, di Pulau Haruku, serta maskapai tambang migas milik Letjen (Purn.) Prabowo Subianto, di Seram Timur lihat Aditjondro, 2004b: 51-2). Untuk Kasus Papua Barat, di mana wilayah kontrak karya perusahaan tambang emas bermodal AS, PT. Freeport Indonesia, menjadi wilayah konsentrasi berbagai bisnis berbaju seragam, termasuk barter gaharu dengan pelayanan seks (lihat Aditjondro, 2004e).

Akhirnya, untuk kasus Aceh, sebelum tsunami, lihat Ishak, 2004. sedangkan tentang kolusi antara modal, militer, dan paramiliter di Aceh, pasca tsunami, masih harus diteliti dan ditulis secara rinci.

5. Jebakan-jebakan dalam meneliti komunitas sendiri

Penelitian di daerah konflik memperhadapkan peneliti dan kerabat kerjanya dengan berbagai 'jebakan', yang juga dihadapi peneliti di daerah 'normal' atau meneliti komunitas 'normal'. Sedikitnya ada lima jebakan tersebut, yakni: a) jebakan 'kami' *versus* 'mereka' (*us versus them*), b) jebakan jender, c) jebakan senioritas, d) jebakan untuk menyesuaikan diri dengan 'pendapat umum' di komunitas yang sedang diteliti, dan e) jebakan status sosial peneliti.

- a) Jebakan 'kami' versus 'mereka' (*us versus them*): lihat butir 1 dan 2.
- b) Jebakan jender: Patriarki, matriarki, dan pembagian kekuasaan dan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, dapat menyebabkan jenis kelamin peneliti dapat mempengaruhi informasi yang diperoleh dari lawanjenisnya.
- c) Jebakan senioritas: umur dan status sosial (lajang atau sudah menikah) dapat mempengaruhi tingkat penerimaan peneliti oleh komunitas yang diteliti.
- d) Jebakan untuk menyesuaikan diri dengan 'pendapat umum' di komunitas yang sedang diteliti: jebakan ini sangat berpengaruh dalam penelitian di

daerah yang sedang atau dilanda oleh konflik komunal atau konflik sektarian. Peneliti yang beragama X dan berasal dari latar belakang etno-linguistik Y akan mengalami 'tekanan' dari tokoh-tokoh komunitas yang seagama dan sesuku, untuk tidak menggali hal-hal yang kurang terpuji dari komunitasnya. Sebaliknya, peneliti tersebut akan didorong untuk membesar-besarkan kejahatan kelompok atau komunitas yang beragama dan bersuku lain, khususnya kelompok agama dan suku yang lain, khususnya kelompok agama dan suku yang dipersepsikan sebagai lawan dalam konflik komunal atau sektarian tersebut.

- e) Jebakan status sosial peneliti: Status sosial peneliti juga sangat mempengaruhi kualitas informasi yang dapat ia peroleh. Walaupun peneliti beragama sama atau berasal dari suku yang sama dengan kelompok yang ditelitinya, kalau ia berasal dari kasata atau lapisan sosial yang lebih rendah dari yang diteliti, si peneliti sulit mendapatkan data yang akurat. Berbagai kelemahan - atau yang penulis sebut 'jebakan' - ini harus sangat disadari oleh peneliti di daerah konflik, sebab dalam penelitian yang lebih bersifat kualitatif, sang peneliti adalah instrumen penelitian yang paling mewarnai hasil penelitian.

B. REKONSTRUKSI UNTUK PENELITI DI DAERAH KONFLIK DAN PASCA BENCANA

Untuk mengatasi berbagai jebakan di atas, ada dua hal yang sebaiknya dilakukan oleh peneliti di daerah konflik atau daerah pasca bencana, yakni pertama, bekerja dalam tim, dan kedua, melakukan triangulasi dengan berbagai metode penelitian. Peneliti sebaiknya bekerja dalam tim yang dilengkapi berbagai anggota dengan identitas etno-religius dan jenis kelamin yang saling melengkapi. Sedangkan soal triangulasi berbagai metode penelitian, akan dijelaskan sebagai berikut: Untuk mengatasi berbagai jebakan dalam penelitian di daerah konflik atau daerah pasca-bencana, metode penelitian wawancara dan survei, harus dilengkapi berbagai metode penelitian yang lain. Ini yang lazim disebut 'triangulasi' dalam literatur metodologi penelitian.

- 1) Metode Pengamatan, metode pengamatan, baik yang tidak terlibat maupun yang terlibat, dapat melancarkan penerimaan peneliti oleh komunitas yang diteliti. Metode pengamatan (*observasi*) juga berguna untuk mempelajari struktur sosial masyarakat yang diteliti. Pengamatan tidak terlibat sebagai undangan dalam acara penting dari suatu lembaga agama, misalnya sidang sinode gereja, dapat membuka

Penelitian dokumenter juga banyak membantu penulis memperoleh gambaran makro tentang aktor-aktor pembangunan yang paling menonjol dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Peranan kelompok Artha Graha yang begitu dominan di Meulaboh, Aceh Barat, telah menjadi perdebatan hangat di media cetak, seperti *Kompas*, *Koran Tempo*, dan majalah *Tempo*.

Berita-berita itu penulis *cross-check* di majalah milik Artha Graha, *Pilars*, yang membeberkan 'pengabdian' kelompok bisnis militer yang dipimpin oleh Tomy Winata dan Jenderal (Purn.) Kiki Syahnarkri itu. 'Pengabdian' di tahap tanggap darurat ini dilanjutkan dengan keterlibatan Artha Graha dan lusinan anak perusahaannya di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi lihat *Pilars*, Edisi Khusus Aceh, 10-16 Januari 2005, Edisi tanggal 14-20 Februari 2005: 14-21; *Koran Tempo*, 28 Januari 2005; *Tempo*, 7-13 Februari 2005: 108-16).

Spanduk-spanduk kelompok Artha Graha di berbagai kota di Aceh bisa menimbulkan kesan menyesatkan. Sebab sumbangan berbagai kelompok bisnis lain ada yang jauh lebih besar. Dari majalah bisnis, *Prospektif*, 10-16 Januari lalu, diperoleh perbandingan untuk menakar peranan Artha Graha (lihat Tabel 1 dan 2 berikut). Di situ tampak kelompok Media Indonesia yang dipimpin penguasa asal Aceh, Surya Paloh, menyumbang hampir 100 milyar kepada rakyat Aceh. Namun dana itu bukan keluar dari rekening bank Paloh sendiri, melainkan dari dompet ribuan prsawan spot 'Indonesia Menangis' di Metro-TV.

Tabel 1: bantuan Kemanusiaan untuk Aceh dari Beberapa Perusahaan Swasta

No	Nama Perusahaan	Jumlah Bantuan (milyar rupiah)
01	Kelompok Media Indonesia (lewat program "Indonesia Menangis" di Metro-TV 1)	99,6
02	Kelompok Astra	39,3
03	Kelompok Artha Graha	20
04	Kelompok Bakrie	10
05	PT. Medco Energy Internasional	10
06	PT. Freeport Indonesia	5
07	Newmont Mining Corporation	5
08	PT Indofood SuksesMakmur	4,7
09	PT. Samsung Elektronik Indonesia	3
10	Probosutejo (melalui Hotel Le Meredian dan Kel. Kedaung.lewatMetro-TV)	3
11	PT. Indomobil Sukses	2,5
12	PT. HM Sampoerna	2
13	PT. Manulife Indonesia	1,6
14	Kelompok Hitachi Machinery	1,4
15	PT. Indocement Tunggul Perkasa	,1
16	Kel. Gajah Tunggal	1
17	PT. Panasonic Gobel (melalui Metri-TV dan Kad in Indonesia)	1
18	Bintang Toedjoe (produsen Rextra Joss)	1

Sumber: *Prospektif*, 10-16 Januari 2005

Tabel 2 Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh dari BUVN

No	U m Etasahaan	Juriah Baituan (rrilyarrupiah)
01	PoskoBLMNPeduli	75
02	Pertarrina	15
03	BankMandiri	6,6
04	PT. Tarrbang Batubara Bukit Asam	1,150
05	Jamsostek	1
06	PT.Telkom '	1

Surrben *Idem*

3) Penelitian forensik

Selanjutnya, untuk daerah konflik seperti Poso, di mana 'pembunuhan misterius' masih berulang terjadi, pengetahuan tentang jenis persenjataan dan dampaknya terhadap tubuh manusia dapat membantu membedakan pertempuran antara penduduk setempat, dengan pembunuhan penduduk setempat oleh penembak profesional. Pengetahuan tentang jenis peluru dan luka yang ditimbulkannya, sudah jadi pengetahuan umum masyarakat maupun para tenaga medis di daerah Poso. Mereka tahu, bahwa senjata organik milik polisi atau tentara, dapat menghasilkan luka yang rapi di depan tetapi terbongkar di belakang; setelah peluru yang meluncur berputar-putar mengelilingi sumbunya keluar dari tubuh. Sebaliknya, luka tembakan senjata rakitan, yang meniru SS (Senapan Serbu) 1 buatan PT. Pindad, dapat menghasilkan luka terbongkar di depan dan tertinggal di dalam badan. Peluru senjata rakitan jarang dapat menghasilkan trayek yang rapi, seperti yang diinginkan penembaknya, yang juga bukan penembak profesional. Misalnya, kepala yang dibidik, tapi dada atau bahkan perut yang kena.

Jadi, kalau ada orang yang mati tertembak dengan luka rapi di jidat tapi dengan otak terbongkar, seperti dialami Pdt. Susy Tinulele di gereja GKST Effatha, Palu, pada Minggu, 18 Juli 2004, karuan saja warga jemaat curiga sang pendeta menjadi korban penembak yang sangat terlatih, menggunakan senjata otomatis yang dibidikkannya dibantu sinar laser. Apalagi setelah Kabid Humas Polda Sulteng, AKB Drs. Victor D. Batara, menegaskan bahwa selongsong peluru dan amunisi aktif kaliber 5,56 mm ditemukan di TKP (Manado Post, 22 Juli 2004).

Kesimpulannya, metodologi penelitian yang diperlukan oleh peneliti di daerah konflik, harus beragam dan saling melengkapi. Mulai dari wawancara, pengamatan (*obsen>asi*), penelitian dokumenter, sampai dengan pengetahuan tentang senjata, amunisi, dan sedikit ilmu kedokteran forensik.

d. Repertoire Inverstigasi Korupsi Dana Kemanusiaan

Apapun yang telah diuraikan sejauh ini adalah metodologi penelitian untuk mengungkap pelanggaran HAM serta dampak kerusakan atau bencana. Itu belum mencakup penelitian untuk mengungkap korupsi dana kemanusiaan di daerah konflik atau pasca bencana. Belakangan ini, para aktivis gerakan anti korupsi di Sulawesi Tengah mengembangkan repertoire dari berbagai metode untuk meneliti sumber korupsi dan pemanfaatan uang hasil korupsi. Antara lain, pengumpulan bon-bon tagihan agen penjualan NCC Travel milik Kepala Dinkesos Provinsi Sulteng. Andi Azikin Suyuti, untuk menyogok para pejabat yang sedang memeriksa dugaan korupsinya, seperti Kajati Sulteng, I Made Yasa, dan Asisten Intelnya, Tris Sumardi.

Balakangan ini, setelah penulis bersama kawan-kawan aktivis melaporkan kasus sogokan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Sulteng langsung kepada jaksa Agung, Arman Saleh, I Made Yasa telah dicopot dari jabatannya, tanpa ada pengganti (Arianto Sangaji, Kom. Pribadi, 28 Juli 2005).

'Jejak Kaki' korupsi Azikin juga diperoleh melalui segepok nota dari sebuah toko alat-alat olah raga di Kota Palu, di mana para wartawan, pejabat, dan aparat keamanan yang dekat dengan Kepala Dinkesos Sulteng itu dapat membeli alat-alat olah raga sampai seharga ratusan ribu, bahkan ada yang ditotal sampai jutaan rupiah. Selanjutnya nota-nota itu ditagihkan ke bawahan Azikin di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulteng (lihat edisi buletin Seputar Rakyat terbitan Yayasan Tanah Merdeka, Palu, yang segera akan terbit).

Sayangnya, usaha membongkar korupsi dana bantuan pengungsi itu sangat tergantung dari kerjasama 'orang dalam' sebagai *whistle blower*. Repotnya, tanpa Undang-Undang Perlindungan Saksi di Indonesia, sejumlah PNS yang diduga memberikan informasi kepada para aktivis dan wartawan di Palu, telah digeser dari posisinya semula di Dinkesos Provinsi Sulteng. Bahkan ada yang, dengan kerjasama petinggi di Kantor Gubernur, dipindahkan ke dinas lain.

Sementara itu, 'jejak kaki' korupsi Andi Azikin Suyuti yang paling menyolok adalah rumah-rumah dan kendaraan-kendaraan pribadi sang Kepala Dinas dan keluarga batinnya di berbagai kota di Indonesia. Baik di Palu

sendiri, di Makassar, di mana dua orang anaknya berkuliah, serta berapa kota di Jawa. Nama serta alamat rumah anak-anak sang Kepala Dinas, diperoleh dari orang-orang dekat sang Kepala Dinas dan keluarganya. Alamat-alamat itu diverifikasi lewat tetangga-tetangga di kompleks-kompleks perumahan mewah itu, lalu didokumentasi dengan kamera biasa.

Informasi bahwa sang Kepala Dinas telah menyogok Gubernur Sulawesi Tengah, Amiruddin Ponulele, dengan membelikan orang nomor 1 di Sulawesi Tengah itu, yang juga Ketua Golkar Sulawesi Tengah, sebuah rumah mewah di daerah Cempaka Putih, Jakarta, diverifikasi dengan cara yang sama. Alamat rumah itu diperoleh dari orang dekat sang Kepala Dinas, diverifikasi lewat tetangga-tetangga di sekitarnya, lalu didokumentasi dengan kamera. Kali ini bukan dengan kamera biasa, tapi dengan kamera HP.

Pola hidup sang Kepala Dinas yang super mewah, ditelusuri di Jakarta, di mana ia senang menghambur-hamburkan kekayaan hasil korupsinya dengan menginap di Hotel Acaccia di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Sang pejabat tampaknya pantang untuk menginap di Wisma Depsos atau hotel sederhana apabila bertugas atau melancong ke Jakarta. Informasi ini penulis verifikasi di Sulawesi Tengah, lalu mencoba mendapatkan kamar di hotel mewah itu. Dengan teknik ini berhasil diverifikasi bahwa sang Kepala Dinas punya account yang cukup besar di hotel itu, sehingga setiap pegawai Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah boleh menggunakan *account* itu untuk mendapatkan discount yang cukup besar untuk menginap di hotel itu.

Yang belum berhasil diverifikasi adalah informasi tentang kegemaran sang Kepala Dinas menraktir orang-orang yang ingin didekatinya di diskotik-diskotik super mahal, seperti Millennium dan Eribu Satu Malam di Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat. 'Obyek' traktiran buat para relasi Azikin itu pun, itu tidak tanggung-tanggung. Menurut sejumlah nara sumber yang patut dipercaya, para relasi Azikin itu Cuma disuguhi makanan dan minuman, tapi juga pelayanan seks dari PSK-PSK impor dari Tiongkok dan negara-negara eks Uni Soviet, yang bertarif jutaan rupiah semalam.

C. PENUTUP

Berbagai tantangan yang dihadapi peneliti di daerah konflik dan daerah pasca-bencana telah diuraikan dalam tulisan ini, khususnya tantangan yang datang 'dari dalam' diri peneliti sendiri. Makanya digunakan istilah 'jebakan' (*pitfall*). Siasat untuk mengatasi jebakan-jebakan itu sudah dibebankan, mulai dari riset berkelompok, atau *team research*, sampai

dengan triangulasi berbagai metode penelitian untuk mengurangi dampak negatif dari jebakan-jebakan di atas.

Selanjutnya, penulis juga telah membagi teknik-teknik penelitian yang dikembangkan oleh para aktivis gerakan anti-korupsi dan kemanusiaan di Sulawesi Tengah, sebagai bahan inspirasi bagi aktivis pro-demokrasi di provinsi lain yang juga daerah konflik, atau daerah pasca-bencana, atau sekaligus daerah pasca-bencana yang masih tetap terlibat dalam konflik dengan pemerintah pusat, seperti Aceh. Mudah-mudahan apa yang diuraikan dalam tulisan pendek ini, dapat bermanfaat bagi para pekerja kemanusiaan di Aceh, di mana trilyunan rupiah beredar atas nama kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditjondro, George Junus. *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan*. LSPP, Jakarta. 2004a.

_____. *Tiga Betas Tesis tentang Kerusuhan dan Konflik Sosial Pasca Soeharto di Indonesia*. Dalam Dicky Mailoa, Jeirry Sumampouw dan Tedy Weohaou. "Gereja-Gereja Menggumuli Konflik dan Kekerasan dalam Era Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia". Crisis Centre PGI, Jakarta, 2004b.

_____. *Kerusuhan Poso dan Morowali: Akar Masalah dan Jalan Keluarnya*. Crisis Centre PGI, Jakarta, 2004c.

_____. *Kayu Hitam, Bisnis Penjagaan, Perdagangan Senjata, dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur*. Dalam Wawasan. INSIST, Yogyakarta, 2004d.

_____. *Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua*. Dalam Wawasan. INSIST, Yogyakarta. 2004e.

Gogali, Nerlian. *Marnier, Migas dan Militer di Ketiak Sulawesi Timur: Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Investor*. Naskah yang belum diterbitkan, t.th.

Ishak, Otto Syamsuddin. *Ganja Aceh dan Serdadu Indonesia dalam Periode Perang Aceh 1989-2003*. dalam Wawasan. INSIST, Yogyakarta, 2004.

Biodata Singkat Penulis

Abdul Kadir Ahmad, lahir di Gowa, 2 Juni 1956 adalah Kepala Balai Litbang Agama Makassar, Ia menyelesaikan program S2 jurusan Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1990 dan menyelesaikan program S3 Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2005 dengan judul disertasi: *Ulama Bugis Dalam Dinamika Sosial di Sulawesi-Selatan; Suatu Analisis Antropologi Agama*. Saat ini juga tercatat sebagai dosen Program Pasca Sarjana UMI Makassar. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai Ketua Pengurus Cabang NU Kota Makassar dan *Board of Director* ECCF-RC Makassar.

Arifuddin Ismail, lahir di Majene, 29 Juni 1957 adalah peneliti Balai Litbang Agama Makassar dan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Balitbang Agama Makassar. Ia menyelesaikan S-2 jurusan Antropologi pada Universitas Negeri Makassar tahun 2000. Pernah mengikuti Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (PLPIIS) di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (1984-1985). Pernah menjadi Dikrektur Lembaga Kajian dan Pengembangan Masyarakat (LKPM), periode 1989-1994; Anggota Badan Musyawarah Forum Informasi dan Komunikasi (FIK) LSM Sulawesi Selatan (1990-1994); Dewan Pembina Balai Latihan Pengembangan Masyarakat (BLPM) LAKPESDAM Indonesia Timur (1991 -2000); Dosen Luar Biasa Universitas Muslim Indonesia (UMI) tahun 1983-1997; Tenaga Pelatih Lepas di berbagai LSM dan instansi pemerintah (Depnaker dan Depag) tahun 1991- sekarang.

Badruzzaman, lahir di Lajoa, Soppeng, 28 Juni 1969 adalah peneliti pada Balai Litbang Agama Makassar. Ia menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama IAIN Alauddin Makassar tahun 1981, Program S-2 Jurusan Sosiologi Pendidikan di Universitas Negeri Makassar tahun 2005. Pernah mengikuti Diklat Calon Peneliti Keagamaan Badan Litbang Agama di Jakarta tahun 1996.

Goefge Junus Aditjonro lahir di Pekalongan, 27 Mei 1946 adalah seorang aktivis LSM yang sangat kritis dan konsen pada persoalan hak-hak kaum tertindas. Ia menyelesaikan program S3 di Cornell University, Ithaca, USA dengan spesialisasi Pendidikan Orang Dewasa. Saat ini ia aktif sebagai Konsultan Penelitian dan Penerbitan Yayasan Tanah Merdeka, Palu; Anggota Dewan Penasehat *Centre for Democracy and Social Justice Studies* (CEDSOS) Jakarta; dan sebagai kolumnis, wartawan, dosen ahli dan dosen terbang di berbagai Perguruan Tinggi, dalam dan luar negeri, dan sebagai peneliti konflik yang kritis.

Hamdar Arraiyah dilahirkan di Soppeng tahun 1957 adalah peneliti (Ahli Peneliti Muda) pada Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Ia menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Adab Jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Alauddin Ujungpandang (1982) dan IKIP Ujungpandang Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (1986), menyelesaikan program S2 di IAIN

AlauddinUjungpandang (1994) serta merampungkan program S3 di IAIN Syarif Hidayatullah tahun 2000 dengan judul disertasi "*Sabar Kunci Surga*".

Muhammad As'ad dilahirkan di Soppeng 1952 adalah peneliti pada Balai Litbang Agama Makassar. Ia menyelesaikan studi SI pada Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujungpandang (1980). Pernah mengikuti Program Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (LPIIS) di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (1984-1985); peserta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penelitian Keagamaan (PKPK) Angkatan XVI di Jakarta (1994) dan Angkatan XXI di Jakarta (1999).

Pat Badrun dilahirkan di Luwu Utara, 3 Desember 1942 adalah peneliti (Ahli Peneliti Utama) pada Balai Litbang Agama Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana di STIAN Ujungpandang dan Program S2 di IPB Bogor tahun 1986. Karya ilmiahnya terdiri dari berbagai laporan Hasil Penelitian Individual dan Kelompok yang dilaksanakan sejak tahun 1985 hingga sekarang dalam bidang agama, sosial, budaya, hukum, dan ekonomi, minimal satu karya setiap tahun.

Sirajuddin Ismail lahir di BIMA-NTB, 16 September 1949 adalah pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Sejak diangkat sebagai pejabat fungsional peneliti pada tahun 1989 telah melakukan penelitian di bidang agama dan sosial. Ia menyelesaikan SI pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar, tahun 1980 dan S2 pada PPS Universitas Negeri Makassar Kekhususan Antropologi, tahun 2004.